

Pembatalan Perkawinan

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata

(Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan Harta

Kekayaannya)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

oleh :

ANGGA PERMANA

NIM : 0810113016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

A. JUDUL

**Pembatalan Perkawinan
Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
(Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan Harta
Kekayaannya)**

B. ABSTRAKSI

ABSTRAKSI

Angga Permana, 2012, Pembatalan Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak dan Harta Kekayaannya), Rachmi Sulistyarini, S.H,M.H.; Adum Dasuki, S.H.,M.S.

Sesuai dengan judul diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana perbandingan hukum tentang pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal akibat hukumnya terkait kedudukan anak dan harta kekayaannya?”

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku pada Pasal 28-48 UU No. 1 Tahun 1974 maupun Pasal 85-98 KUHPerdara dan juga membandingkan antara peraturan yang satu dengan yang lain, baik dari segi perbedaannya maupun persamaannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan tentang pembatalan perkawinan terkait rumusan masalah diatas. Selain itu penelitian ini memiliki manfaat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam memperbaiki peraturan-peraturan yang ada terkait masalah pembatalan perkawinan dan untuk masyarakat agar bisa menjadi suatu bahan pengetahuan bagi mereka.

Adapun hasil dan pembahasan yang saya jelaskan disini yakni bahwa menurut UU No. 1 Tahun 1974 anak tetap dianggap sebagai anak yang sah dan orangtua memiliki kewajiban ke anak yang tidak terputus walau perkawinan mereka telah putus atau batal. Sedangkan menurut KUHPerdara ada macam-macam kedudukan anak yang intinya tetap sebagai anak sah dan orangtua tetap memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya walau sudah putus atau batal perkawinan mereka.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penulis memperoleh hasil sebagai berikut : (1) Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak yang sah, sehingga anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtua mereka. (2) Dalam hal harta kekayaan, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap mendapat bagian harta kekayaan tersebut sebagai hak mereka meskipun perkawinan orangtua mereka telah putus atau batal. Adapun saran dari penulis diharapkan pemerintah membuat sinkronisasi hukum dengan adanya perbandingan hukum tersebut, dan bagi masyarakat disarankan lebih mengetahui tentang hak-hak anak mereka dan kewajiban mereka sebagai orangtua.

ABSTRACT

ANGGA PERMANA, 2012, Cancellation of Marriage Under Law No. 1 of 1974 by the Book of the Law Civil Law (Law of Comparative Studies About Children and Treasure Wealth Status), Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H.; Adum Dasuki, S.H.,M.S.

In accordance with the above title, then the problem is formulated as follows : “What is the ratio of the cancellation law marriage under law No. 1 of 1974 by the Book of the Law Civil Law in terms of the legal consequences related to the position of the child and their property?”.

To analyze the problems, the authors uses normative juridical approach. The research focused on reviewing the rules or norms and regulations in force in both Article 28-48 Law No. 1 Of 1974 and the Book of the Law Cibil Law Article 85-98, and also compare the rules with each other, both in terms of differences and similitudes.

Of course, this study has the objective to analyze and describe the similitudes and differences of the cancellation of marriage related formulation of the problem above. In addition this study has the advantage to provide input to the government to improve the existing regulations on the issue of marriage and annulment to the public in order to become an ingredient for their knowledge.

The results and discussion which I explain here that according to Law No.1 of 1974 children still regarded as a legitimate child and their parents have responsibility to uninterrupted though their marriage had broken up or cancelled. Meanwhile, according to the Book of the Law Civil Law there are various child notch point remains valid as children and parents still have a civil relationship with their children despite marriage break up or cancelled.

Based on these results, the authors obtained the following results : (1) That the children were born of the marriage were cancelled, still regarded as a legitimate children, so that children who are born it has a clear legal status and

authorized as a child of their parents. (2) In terms of wealth, children born of the marriage gets fixed assets as part of their rights even if their parents marriage had broken up or cancelled. The suggestion of the authors expected for the governments to make laws synchronization with the comparative law and for public suggested them to more aware of their children's rights and responsibilities as a parent.

C. KATA KUNCI : *Differences, Similanties, Cancellation Of Marriage, Normative Juridical, The Book Of The Law Civil Law, Law No. 1 of 1974*

D. PENDAHULUAN

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila :

1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).¹

Kemudian akibat dari pembatalan perkawinan itu sendiri, ada beberapa hal yang tidak berlaku surut atas putusan pengadilan mengenai batalnya suatu perkawinan seperti yang dibahas dalam UU No.1/1974 pasal 28 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²

Sedangkan pembatalan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 85 berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum, “pernyataan batal” suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan. Keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Ibid., hal 546

dinyatakan berwenang untuk itu³ dan untuk kedudukan anak dalam pembatalan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah merupakan tetap anak yang sah dari orang tua yang membatalkan perkawinan tersebut.

Pada pasal 95 KUHPerdata, suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami-istri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami-istri itu.

Dalam pasal tersebut di atas intinya menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi walaupun perkawinan kedua orangtuanya oleh pengadilan telah diputuskan dibatalkan, akan tetapi putusan pengadilan tidak mempengaruhi kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dan mereka tetap dianggap anak sah yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah.

Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka hidup dalam perkawinan, tetapi dalam Pasal 45 (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orangtua berlaku terus sampai anak mencapai kedewasaan meskipun perkawinan antara kedua orangtuanya putus. Selain itu dalam Pasal 298 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa.

³Soetojo Prawirohamidjojo 2006. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Hal. 73

E. MASALAH

Berdasarkan pendahuluan diatas dan peraturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
“Bagaimana perbandingan hukum tentang pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal akibat hukumnya terkait kedudukan anak dan harta kekayaannya?”

F. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yaitu dengan menganalisis tentang perbandingan hukum tentang pembatalan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal akibat hukumnya terkait kedudukan anak dan harta kekayaannya. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan) dengan metode *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual).

Dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Bahan hukum yang diperlukan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang jenis-jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.

1. Bahan hukum primer :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan para ahli.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan wikipedia.

Teknik penelusuran dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik, dan *cyberspace* (internet). Dalam penelusuran bahan hukum ini peneliti melakukan langkah inventarisasi, pemahaman, penafsiran, dan pengklasifikasian tentang pembatalan perkawinan. Untuk itu, dalam penelusuran bahan hukum ini penulis menyalin dalam catatan penelitian, memfotokopi, mengakses dari internet dan menyimpan dalam media *harddisc* atau *flashdisc*. Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut diperoleh, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka dihubungkan sedemikian rupa, dan selanjutnya dianalisa menggunakan metode preskriptif dengan menggunakan teknik penafsiran hukum gramatikal yang berkaitan dengan ketentuan pembatalan perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada.

Adapun teknik interpretasi gramatikal yang akan digunakan yaitu dengan cara penafsiran dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selain teknik interpretasi gramatikal, teknik interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi sistematis, yaitu teknik interpretasi dengan cara menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Setelah semua bahan hukum terkumpul, penulis melakukan analisis dan menuangkan dalam naskah ini. Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan teknik berfikir induktif, deduktif, dan komparatif.

G. PEMBAHASAN

KUHPerdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja, jadi hanya menyangkut hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan lebih luas, tidak hanya dalam hubungan keperdataan saja namun juga hubungan antara manusia dan Tuhan.

1. Perbedaan dalam Hal Mengatur Kedudukan Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan, sehingga anak tetap menjadi anak sah dan berhak mewaris tanpa memandang adanya itikad baik dari kedua suami istri saat melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut KUHPerdata, anak merupakan anak sah dan berhak mewaris jika kedua suami istri beritikad baik atau jika salah satu dari suami istri saja yang beritikad baik. Jika kedua suami istri beritikad buruk, maka anak akan berstatus sebagai anak luar kawin. Jika anak luar kawin ini diakui, maka anak tersebut berhak mewaris. Namun, jika anak luar kawin tersebut tidak diakui maka ia tidak berhak memperoleh bagian warisan.

Sedangkan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap sebagai anak-anak yang sah. Keturunan (*afstamming*) adalah hubungan darah antara anak-anak dan orangtuanya. Undang-undang mengatur tentang anak-anak sah dan anak-anak tidak sah (*wettige en onwettige kinderen*), yang terakhir ini juga diberi nama anak luar nikah (*natuurlijk kinderen*) atau diterjemahkan "anak-anak alam"⁴.

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 250 KUHPerdata menentukan bahwa tiap-tiap anak yang

⁴ Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal.18

dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sah atau tidaknya status seorang anak sangat tergantung dari keabsahan perkawinan orangtuanya.

Kata “sepanjang perkawinan”, artinya sejak perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu dilangsungkan secara sah. Perkawinan itu putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUHPdata dan Pasal 38 UU Perkawinan). Disini tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Oleh karena itu pada dasarnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUHPdata, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Tidak disyaratkan, bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru memegang peranan penting.

Pada umumnya anak-anak alam adalah anak-anak yang lahir atau dibenihkan di luar pernikahan. Mereka dibagi dalam dua golongan: (a) anak-anak luar nikah dalam arti kata luas, yaitu semua anak yang lahir tanpa pernikahan orangtuanya, dan (b) anak-anak luar nikah dalam arti kata sempit, yaitu anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak-anak zina (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschennig*). Sedangkan untuk anak tidak sah sering kali juga dipakai istilah anak luar kawin dalam arti luas.

Anak tidak sah di dalam doktrin dibedakan antara anak zina, anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit). Pembagian anak tidak sah dalam 3 (tiga) kelompok seperti itu adalah sesuai dengan penyebutan yang diberikan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 283 KUHPdata, khususnya penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUHPdata.

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUHPerdata).

Begitu juga halnya dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara kedua orangtuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan itu”. Artinya yang dibatalkan itu adalah di mana sejak perkawinan tersebut dilangsungkan yaitu ketika terjadi akad nikahnya antara suami istri yang perkawinan dibatalkan tersebut sebelum adanya anak dan sesudah adanya anak dan ketika adanya keputusan, tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang terlahir di dalamnya.

Begitu juga halnya dalam KUHPerdata sehubungan dengan anak yang dilahirkan dari akibat dibatalkannya perkawinan diantara kedua orangtuanya. Secara hukum formil ini terurai jelas dalam diatur dalam bab ke-I, bagian keenam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu perkawinan, walaupun telah dibatalkan, tetapi mempunyai segala akibat perdata, baik terhadap suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, asal saja perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya telah dilakukan dengan itikad baik”. Akan tetapi pada bab ke 12 bagian ke tiga Pasal 283 KUHPerdata disebutkan “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam sumbang, sekali-kali tak boleh diakui, kecuali terhadap yang terakhir ini apa yang ditentukan dalam Pasal 273.” Dari pasal ini secara otomatis bila tidak ada pengakuan, maka segala akibat hubungan perdata antara anak dan orangtua akan hilang.

2. Perbedaan Dalam Hal Mengatur Harta Kekayaannya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pengaturan harta bersama akibat dari putusan batalnya perkawinan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dikembalikannya pengaturan harta bersama yang merupakan akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada Pasal 37 yang mengatur tentang akibat hukum perceraian terhadap harta bersama karena putusan pengadilan dalam perkara pembatalan perkawinan khususnya dalam hal perkawinan yang dilakukan dengan itikad baik juga berlaku sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti halnya dengan perkara gugatan perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan di atas tidak membahas secara lebih rinci mengenai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan, sehingga beberapa ketentuan dalam KUHPdata mengenai pembatalan perkawinan masih berlaku. Demikian pula mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan uraian yang mendalam, sehingga akibat hukum dari pembatalan perkawinan menurut KUHPdata dipandang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan menurut KUHPdata untuk harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan hingga putusan batalnya perkawinan akan dibagi dua sebagaimana sudah dijelaskan kecuali apabila sebelum melangsungkan perkawinan para pihak tidak membuat perjanjian kawin, apabila perkawinan yang tidak adanya itikad baik dari suami dan istri, maka akibat hukum perkawinan tersebut sama sekali tidak ada bahkan keputusan hakim akan

berlaku surut sampai pada saat perkawinan dilangsungkan, maka pada perkawinan tersebut tidak terdapat persatuan harta perkawinan.⁵

Mengenai harta waris bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, maka anak-anak itu tetap dianggap sebagai anak yang sah, anak-anak itu juga mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan dengan keluarga si ayah atau ibu. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut KUHPerdara hal-hal tersebut di atas berlaku ketika pembatalan perkawinan yang terjadi karena pelanggaran dalam syarat formal saja seperti : wali yang tidak berwenang atau poligami tanpa izin. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena syarat materiil (larangan tetap seperti perkawinan karena nasab) dan pelanggaran lain seperti karena zina, maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang timbul dari hubungan pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada pula atau tidak mendapat perlindungan hukum.

3. Persamaan Dalam Hal Mengatur Kedudukan Anak

Dijelaskan pada Pasal 95 KUHPerdara menyatakan : “Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik”, sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hubungan dengan orangtua mereka termasuk dalam hal penguasaannya.

Dan menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dua penafsiran, penafsiran pertama bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai satu makna yaitu anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian untuk status anak akibat dari pembatalan perkawinan, pada Pasal 28 (2) UU No. 1 Tahun 1974 juga ditegaskan meskipun terjadi pembatalan

⁵ Ibid

perkawinan keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap, “anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

Anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang dibatalkan tetap memiliki hubungan dengan orangtuanya sehingga seorang anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak hanya mempunyai hak terhadap orangtuanya saja, akan tetapi anak juga mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya. Kewajiban tersebut, yaitu :

- a. Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, bila mereka memerlukan bantuannya.

Jadi pada intinya baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun KUHPdata mengenai kedudukan anak adalah tetap dalam penguasaan orangtua dan tetap diakui sebagai anak mereka meski perkawinan kedua orangtuanya sudah putus atau batal.

4. Persamaan Dalam Hal Mengatur Harta Kekayaannya

KUHPdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja, jadi hanya menyangkut hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan lebih luas, tidak hanya dalam hubungan keperdataan saja namun juga hubungan antara manusia dan Tuhan. Terhadap pihak ketiga, Pasal 28 (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari putusan batalnya perkawinan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Dikembalikannya pengaturan harta bersama yang merupakan akibat hukum dari pembatalan perkawinan pada Pasal 37 yang mengatur tentang akibat hukum perceraian terhadap harta bersama karena putusan pengadilan dalam perkara pembatalan perkawinan khususnya dalam hal perkawinan yang dilakukan dengan itikad baik juga berlaku sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti halnya dengan perkara gugatan perceraian. Sedangkan akibat perkawinan selain masalah anak adalah yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari Pasal 28 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari Pasal 28 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan niat baik dalam arti diantara suami istri tidak ada unsur kesengajaan sebelumnya untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama diantara suami istri. Dikarenakan keputusan pengadilan tidak berlaku surut dalam arti keputusan pengadilan yang membatalkan perkawinan berlaku saat keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (sama dengan saat berlakunya putusan perceraian). Dengan demikian walaupun perkawinan itu tidak sah namun karena perkawinan ini dilakukan dengan itikad baik, maka diberi perkecualian dalam hal harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, yakni setelah perkawinan dibatalkan masing-masing mantan suami dan mantan istri tetap memperoleh harta bersama.

Kemudian menurut KUHPerdara seperti yang dijelaskan pada Pasal 95–98, adapun dampak atau akibat dari pembatalan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Bab ke- 4 bagian ke-enam Pasal 95 KUHPerdara menyatakan : “Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan, mempunyai akibat perdata baik terhadap suami istri maupun terhadap anak-anak mereka, asalkan perkawinan itu oleh suami istri kedua-duanya dilakukan dengan itikad baik”. Akan tetapi jika itikad baik itu hanya pada salah satu pihak saja, maka pasal selanjutnya yakni Pasal 96 menyatakan bahwa pihak yang berlaku dengan itikad baik mendapat akibat perdata yang menguntungkan saja, begitu pula anak-anaknya. Sebaliknya bagi yang beritikad buruk, maka pembatalan perkawinan itu mengakibatkan penghukuman untuk membayar segala biaya ganti rugi dan bunga bagi pihak lainnya.

Jadi persamaannya di sini adalah keduanya baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KUHPerdara sama-sama mengatur tentang harta kekayaan untuk anak yang lahir dari perkawinan tersebut sebagai hak mereka meskipun perkawinan orangtua mereka telah putus atau batal.

H. PENUTUP

a. Kesimpulan

Maka berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap merupakan anak yang sah dari kedua orang tuanya. Hal ini didasarkan pada kemanusiaan dan kepentingan anak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orangtua mereka.

Sedangkan untuk masalah harta kekayaan, anak-anak tersebut tetap mempunyai hak untuk dipelihara dan dibiayai semua kebutuhannya oleh kedua orangtuanya karena tetap dianggap sebagai anak yang sah, dan juga anak-anak tersebut tetap mendapat bagian harta kekayaan dari orangtuanya

sebagai hak mereka meskipun perkawinan orangtua mereka telah putus atau batal.

Sebenarnya juga antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUHPdata tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan dalam hal akibat hukumnya terkait masalah tentang kedudukan anak dan harta kekayaannya dengan adanya putusan pembatalan perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya kemiripan dalam hal pengaturan hukumnya. Hanya saja pada KUHPdata ada hal-hal yang lebih dijelaskan terperinci mengenai macam-macam kedudukan anak dan ada hal-hal yang dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama dalam sebuah perkawinan, akan tetapi baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KUHPdata mempunyai inti yang sama, terkait masalah kedudukan anak dan harta kekayaannya sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan.

b. Saran

Dengan adanya perbandingan hukum diatas, harusnya pemerintah membuat sinkronisasi hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan khususnya masalah akibat hukumnya, agar tidak menimbulkan pendapat serta opini yang tumpang tindih yang nantinya bisa menimbulkan masalah baru dan nantinya peraturan tersebut mampu memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

Selain itu dalam hal ini disarankan agar masyarakat lebih mengetahui tentang hak-hak anak mereka dan mengetahui kewajiban sebagai orangtua kepada anaknya untuk memelihara, memenuhi kebutuhan mereka. Walaupun nantinya perkawinan mereka putus atau batal, anak tersebut tetap dalam penguasaan mereka sebagai anak yang sah, karena tidak ada istilah mantan anak pada perkawinan.

I. DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2006. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Airlangga University Press.

Tan Thong Kie, 2000. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.34, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.34, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dengan Penjelasannya, R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.34, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.34, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.

Kompilasi Hukum Islam, Arkola.